

Analisis Sistem Informasi Perpajakan di Kabupaten Lamandau

Sunneng Sandino Berutu

Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Komputer, Universitas Kristen Immanuel

Abstrak

Menerapkan perkembangan teknologi sistem informasi terbaru perlu dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas kinerja di instansi pemerintahan. Penelitian dilakukan untuk menganalisis sistem informasi perpajakan di Kabupaten Lamandau sebagai acuan implementasi sistem yang baru. Metode yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data yang ada, sensus, observasi, survei sampel, wawancara dengan tokoh, wawancara kelompok. Proses analisis diawali dengan tahapan analisis sistem yang sudah ada, membuat gambaran sistem, menganalisis prosedur, membuat E-R dan DFD diagram kemudian merancang database dan antarmuka.

Kata kunci : analisis, sistem, informasi

1. Pendahuluan

Daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan salah satu Pemerintah Kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya pajak sebagian masih dilakukan secara manual meskipun dalam penggunaan Aplikasi teknologi komputer sudah dilibatkan dalam proses oprasional, namun adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pengoperasiannya maka pemanfaatan Teknologi komputer hanya sebatas menggunakan program Microsoft Excel dan Microsoft Word, seperti penetapan dan penggolongan Pendapatan Asli Daerah, mencatat dan merekap data-data pendaftaran, penerimaan dan lainnya, laporan dibuat berdasarkan kalkulasi dari dokumen-dokumen dari penerimaan yang terjadi, setelah itu baru dicatat dalam file komputer.

2. Landasan Teori

2.1. Konsep Dasar Sistem

Sistem adalah satu hal yang terpenting dalam membuat perancangan sistem informasi. Pada umumnya setiap organisasi selalu mempunyai sistem informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, melihat, dan menyalurkan informasi. Sistem informasi dapat terbentuk karena didorong oleh kebutuhan akan informasi yang terus meningkat yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan.

2.2. Definisi Sistem

Dalam (Jogiyanto, 2005) terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya mendefinisikan sistem sebagai berikut : "Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu." Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen atau elemennya mendefinisikan sistem sebagai berikut : "Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu."

2.3 Karakteristik Sistem

Karakteristik system (Jogiyanto, 2005) terdiri dari : komponen sistem ,batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem dan sasaran system.

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak akan berguna. Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuannya.

2.4 Klasifikasi Sistem

Klasifikasi sistem dari beberapa sudut pandang (Jogiyanto, 2005), yaitu :sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alamiah dan sistem buatan manusia, sistem tertentu dan sistem tak tentu, sistem tertutup dan sistem terbuka.

2.5 Informasi

Beberapa hal yang perlu dipertimbangan dalam sebuah informasi, yaitu : kualitas informasi, siklus informasi dan kegiatan sistem informasi.

3. Metode Penelitian

3.1 Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data internal (misalnya data keuangan, data pegawai, data wajib pajak) dan data eksternal (contohnya data jumlah hotel atau restoran yang ada di sebuah kota).

Selain itu, terdapat klasifikasi data berdasarkan jenis data, yaitu data kuantitatif (jumlah perusahaan yang sudah membayar retribusi tertentu, jumlah penerimaan pajak dalam periode tertentu) dan data kualitatif (contohnya persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor pajak).

3.2 Penggunaan Data yang Sudah Ada

Dapat diperoleh data demografis berdasarkan sensus penduduk sebelumnya, atau pola penyakit tertentu serta bentuk pelayanan kesehatan, serta mempelajari kultur dan pola kehidupan suatu daerah.

3.3 Sensus

Sensus digunakan untuk menggambarkan suatu survei yang mencakup keseluruhan penduduk. Pelaksanaan sensus akan sulit berjalan di negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar atau informasinya terlalu kompleks. Penyebabnya adalah komunikasi serta terbatasnya sumber yang ada.

3.4 Wawancara dengan Tokoh – Tokoh Kunci

Tokoh merupakan sarana yang sangat berguna dalam memperoleh informasi yang tidak dipublikasikan atau berbagai informasi faktual lainnya.

3.5 Wawancara Kelompok

Pada kasus ini orang – orang akan diinterview pada umumnya diundang untuk menghadiri pertemuan, kemudian berbagai pertanyaan disajikan dalam diskusi umum. Dengan cara inilah para perencana dapat mencari berbagai informasi yang dibutuhkan sambil memberi kesempatan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas.

3.6 Observasi Partisipasi

Observasi partisipan merupakan salah satu diantara sedemikian banyak cara yang sangat potensial dalam memperoleh informasi berskala luas mengenai masyarakat, corak kehidupan, keadaan lingkungan, karena peneliti akan menghabiskan banyak waktu dilapangan dan harus mau bersusah payah untuk mendapat informasi yang akurat.

3.7 Pengumpulan dan Analisis Kebutuhan

Informasi yang dikumpulkan untuk setiap user view utama meliputi :

- a. Deskripsi data yang digunakan atau yang dihasilkan
- b. Perincian mengenai bagaimana data digunakan dan dihasilkan.
- c. Beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi basis data yang baru

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis sistem yang ada

Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki sistem manajemen pendapatan daerah standar. Di dalam sistem tersebut, identitas pajak masing-masing wajib pajak. Calon wajib pajak diwajibkan mengisi form pendaftaran yang berisi identitas wajib pajak disertai dengan membawa identitas resmi seperti KTP, akte kelahiran, dan surat keterangan tempat kegiatan atau usaha dari instansi berwenang. Di dalam form tersebut juga terdapat penjelasan singkat tentang objek pajak yang akan diajukan. Formulir pendaftaran wajib pajak harus disampaikan ke DPPKAD paling lambat tujuh hari sebelum usahanya diselenggarakan. Data wajib pajak dan objek pajak tersebut akan diisikan oleh admin ke dalam sistem untuk dijadikan data wajib pajak. Kemudian admin akan memberikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) kepada wajib pajak.

Setelah sebulan dari proses pendaftaran, maka wajib pajak diharuskan membayar pajak dengan membawa SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) berdasarkan objek pajak, rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan, rekapitulasi penggunaan bon, rekapitulasi penggunaan tiket masuk untuk pajak hiburan, dan bukti setoran pajak yang telah dilakukan. Pembayaran diberikan kepada bagian kas DPPKAD. Tapi untuk pendataan dilakukan oleh admin. Apabila wajib pajak telat membayar denda, maka sistem akan menghitung pajak yang harus dibayar bersama denda dari pajak tersebut.

4.2 Gambaran Umum Sistem

Pada dasarnya, fungsi-fungsi dan aliran data yang terdapat dalam sistem ini hampir sama dengan sistem yang telah ada. Peraturan-peraturan yang tercantum di sistem sebelumnya juga diterapkan dalam sistem ini. Pengembangan sistem pendapatan daerah dari sistem yang telah ada di DPPKAD bertujuan untuk memperluas fungsi sistem. Sistem ini dapat melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pendaftaran Identitas Wajib Pajak,
2. Mendata objek pajak,
3. Memproses penghitungan pajak yang harus dibayar ,
4. Mendata Pembayaran yang telah dilakukan,
5. Menu pelaporan.

Sistem ini melayani pendaftaran dengan mengisi form yang telah tersedia, bukti-ukti fisik identitas diri harus disertakan. Setelah seorang calon wajib pajak melakukan pendaftaran, admin akan mengecek kevalidannya kemudian akan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD). Kemudian akan dilakukan pendataan objek pajak yang telah didaftarkan, pendataan ini kemudian akan dilakukan setiap bulan. Setelah dilakukan pendataan, akan Ditetapkan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan jenisnya. Besar pajak tersebut akan dikalikan dengan omset yang didapat oleh objek pajak. Wajib pajak dapat mengetahui pajak yang harus dia bayar dan melakukan pembayaran.

4.3 Analisis Prosedur

Seperti yang telah digambarkan secara umum didalam gambaran umum sistem, di dalam sistem yang akan dibuat ini terdapat beberapa prosedur yang harus dijalankan. Prosedur-prosedur yang merupakan urutan proses bisnis di dalam dinas pendapatan daerah tersebut antara lain

dimulai dari pendaftaran, dilanjutkan dengan pendataan, dan diakhiri dengan pembayaran.

1. Prosedur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan pengisian form pendaftaran yang tersedia dengan memasukkan identitas calon wajib pajak juga keterangan alamat dan jenis objek pajak yang akan didaftarkan. Di dalam form tersebut dianjurkan untuk memasukkan nomor surat izin usaha jika sudah ada. Pendaftaran dilakukan paling tidak tujuh hari sebelum usaha dijalankan. Setelah calon wajib pajak melakukan pendaftaran, maka identitasnya akan di cek ke validannya oleh admin. Apabila identitas tersebut sudah benar, maka calon wajib pajak akan diberi nomor pokok wajib pajak dan menjadi wajib pajak.

2. Prosedur Pendataan

Setiap bulannya objek pajak yang telah didaftarkan oleh wajib pajak akan didata oleh pihak dinas pendapatan daerah untuk ditentukan besar pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak Untuk pajak parkir, restoran, hotel dan hiburan, yang akan dilihat adalah omset yang diraih tiap bulannya. Sedangkan untuk pajak reklame dan pajak mineral bukan logam dan bebatuan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati Lamdau.

3. Prosedur Pembayaran

Setelah objek pajak didata, maka dinas pendapatan daerah akan menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian wajib pajak akan diberitahu berapa jumlah yang harus dibayar. Biasanya pendataan dilakukan pada tanggal satu, dan paling lambat pembayaran dilakukan pada tanggal 20.

a. Pembayaran untuk Restoran

Pembayaran untuk pajak restoran dilihat dari omset yang didapat tiap bulannya tergantung pada jenis restoran tersebut. Untuk pajak restoran, jenisnya dibedakan menjadi dua macam yaitu restoran dengan besar pajak 10% dan rumah makan dengan besar pajak 8%.

b. Pembayaran untuk hotel

Sama seperti pajak restoran, pajak hotelpun ditentukan dari omset yang didapat dan jenisnya. Jenis untuk hotel adalah bintang lima dengan pajak 15%, bintang empat dengan pajak 15%, bintang tiga dengan pajak 15%, bintang dua dengan pajak 10% dan bintang satu dengan pajak 10%.

c. Pembayaran untuk reklame

Pembayaran untuk pajak reklame tergantung jenisnya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati. Jenis untuk reklame antara lain reklame papan dengan pajak 25%, reklame kain dengan pajak 25%, reklame sticker dengan pajak 25%, reklame selebaran dengan pajak 20%, reklame berjalan dengan pajak 20%, reklame udara dengan pajak 20%, reklame suara dengan pajak 20%, dan reklame film dengan pajak 20%.

d. Pembayaran untuk Hiburan

Pembayaran untuk pajak hiburan ditentukan oleh omset dan jenis hiburan objek pajak. Hiburan memiliki dua klasifikasi yaitu Bioskop dan Kesenian. Bioskop memiliki beberapa jenis yaitu Golongan A II utama dengan nilai pajak 12,5 %, Golongan A II dengan nilai pajak 10%, golongan A I sebesar 10%, golongan B II sebesar 7,5%, golongan B I sebesar 7,5 %, golongan C sebesar 5%, dan golongan D sebesar 5%. Sedangkan untuk kategori kesenian terdiri dari pameran seni dengan nilai pajak sebesar 10%, pagelaran musik sebesar 25%, diskotik sebesar 30%, bilyard sebesar 10%, panti pijat sebesar 25 %, mandi uap sebesar 25%, pertandingan olahraga sebesar 12,5%, bowling sebesar 15%, tempat rekreasi sebesar 10%, pusat kebugaran sebesar 10%, dan jasa pemandu lagu sebesar 30%.

5. Kesimpulan

Analisis dan perancangan sistem informasi pajak kabupaten Lamandau telah selesai dibuat dan menjadi acuan untuk tahap implementasi. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini belum mengarah pada sistem pembayaran melalui proses transfer dari berbagai bank yang ada..

Daftar Pustaka

Abdul Kadir, 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Jogiyanto, 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi